PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

FENOMENA PENDIRIAN RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI): UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ATAU KAPITALISASI PENDIDIKAN

Bidang Kegiatan :

PKM – GT

Diusulkan oleh :

Zurriat Nyndia Rahmawati	109221422441 (2009)
Alfima Azmi Imananda	109221422432 (2009)
Eko Jayanto	108241410636 (2008)

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

KOTA MALANG

2010

LEMBAR PENGESAHAN USULAN PKM- GT

1. Judul Kegiatan : Fenomena Pendirian Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI): Upaya Peningkatan Pendidikan atau Kapitalisasi Pendidikan
2. Bidang Kegiatan : ( ) PKM-AI (√) PKM-GT
3. Ketua Pelaksana Kegiatan
   a. Nama Lengkap : Zurriat Nyndia Rahmawati
   b. NIM : 109221422441
   c. Jurusan : Sastra Inggris
   d. Universitas/Institut/Politeknik : Universitas Negeri Malang
   e. Alamat Rumah dan No Tel./HP : Jalan Simpang Dirgantara V B6/ 02, Malang - 08563619946
   f. Alamat email : loph.teddybear@yahoo.com
4. Anggota Pelaksana Kegiatan/ Penulis : 2 orang
5. Dosen Pendamping
   a. Nama Lengkap dan Gelar : Niamika El Khoiri, S. Pd, M. A.
   b. NIP : 19760507 200312 2 001
   c. Alamat Rumah dan No Tel./HP : Perum Joyogrand Blok L/144, Malang

Malang, 12 Maret 2010

Menyetujui
Ketua Jurusan/Program Studi/
Pembimbing Unit
Kegiatan mahasiswa

(Dra. Utami Widiati, M. A., Ph. D)
NIP.19650813 199002 2 001

Ketua Pelaksana
Kegiatan

(Zurriat Nyndia R.)
NIM. 109 221 422 441

Pembantu atau Wakil Rektor
Bidang Kemahasiswaan/
Direktur Politeknik/
Ketua Sekolah Tinggi,

(Drs. Kadim Masjkur, M. Pd)
NIP. 19541216 198102 1 001

Dosen Pendamping

(Niamika El Khoiri)
NIP. 19760507 200312 2 001

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan bimbingan dan petunjuk-Nya kami dapat menyelesaikan proposal Program Kreatifitas Mahasiswa- Gagasan Tertulis (PKM- GT) "Fenomena Pendirian Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI): Upaya Peningkatan Pendidikan atau Kapitalisasi Pendidikan".

Dewasa ini, fenomena pendirian RSBI merupakan salah satu bahasan yang sangat menarik. Meskipun sudah cukup banyak diskusi dan pembahasan mengenai RSBI, namun penulis ingin memperdalam pembahasan fenomena pendiriannya yang menjadi trend di lingkungan pendidikan. Selain itu, program pemerintah ini juga banyak mengundang pro dan kontra baik di kalangan pendidikan maupun masyarakat. Bertolak dari sanalah penulis mengangkat tema tersebut dan berusaha memberikan solusi yang dapat diemplementasikan secara nyata.

Atas terselesaikannya proposal PKM- GT ini, penulis berterima kasih kepada Ibu Niamika El Khoiri selaku dosen pembimbing, beserta pihak-pihak lain yang telah membantu dan mendukung atas terselesaikannya proposal PKM ini.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam proposal PKM ini masih terdapat banyak kekurangan, baik menyangkut isi maupun tulisan. Kekurangan-kekurangan tersebut disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif sehingga kami dapat berbenah diri dan dapat memberikan yang terbaik.

Malang, 12 Maret 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL …… i
LEMBAR PENGESAHAN USULAN PKM- GT …… ii
KATA PENGANTAR …….. iii
DAFTAR ISI …… iv
RINGKASAN ……... v

PENDAHULUAN …… 1
Latar Belakang …….. 1
Tujuan dan Manfaat …….. 2

GAGASAN …….. 3
Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) …… 3
Standar RSBI ……..……..……... 4
Pembiayaan RSBI ……. 5
Gagasan Baru ……. 7

KESIMPULAN ……. 8

DAFTAR PUSTAKA …….. 9

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ……. 11

Fenomena Pendirian Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI): Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan atau Kapitalisasi Pendidikan

Zurriat Nyndia R., Alfima Azmi I., Eko Jayanto
Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang

RINGKASAN

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) merupakan sekolah calon dari Sekolah Bertaraf Internasional. RSBI adalah realisasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 50 ayat 3 tentang pendirian sekolah internasional, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional dan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar dapat bersaing secara global di forum internasional.

Sebagai sekolah yang dipersiapkan untuk memenuhi standar internasional, RSBI membutuhkan biaya yang cukup besar. Biaya yang cukup tinggi tersebut dipenuhi melalui subsidi pemerintah dan swadaya sekolah. Keterbatasan subsidi pemerintah, membuat biaya lebih dibebankan pada orangtua. Akibatnya, hanyalah golongan orang mampu yang dapat bersekolah di RSBI.Ketidakmerataan kesempatan pendidikan di RSBI antara orang mampu dan kurang mampu, menjadi tanda mumculnya kapitalisasi pendidikan.

Untuk meminimalisir RSBI dari kapitalisasi pendidikan, kami menggagas suatu solusi. Pertama, perbaikan sistem seleksi penerimaan siswa baru RSBI yang bertujuan benar-benar menyaring siswa yang berkualitas dan menjamin kemerataan kesempatan pendidikan di RSBI. Tes tersebut meliputi penyaringan nilai raport, nilai Ujian Akhir Nasional, dan tes tulis yang distandarisasi oleh Dinas Pendidikan tingkat Daerah. Adapun tes psikologi siswa, diserahkan kepada pihak yang telah kualifikasi di bidang psikologi yang akan menjalin kerjasama dengan pihak sekolah.

Kedua, menggunakan program subsidi silang dengan cara membuka program RSBI kelas regular dan mandiri untuk mengatasi permasalahan biaya yang dibebankan pada siswa yang kurang mampu. Siswa kelas mandiri akan membayar biaya sekolah yang lebih besar daripada siswa kelas reguler, dan nanti akan digunakan untuk meringankan biaya dari siswa yanng kurang mampu yang bersekolah di RSBI.

Maka, dengan adanya gagasan baru diatas, diharapkan dapat menjadikan RSBI sebagai sekolah yang benar-benar berkualitas dan terbuka bagi semua kalangan. Serta dapat menghasilkan generasi Indonesia berkualitas yang dapat bersaing di forum internasional.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah sebagai salah satu pihak dalam penyelenggaraan pendidikan nasional membuat UU Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 50 Ayat 3 yang memuat peraturan bahwa tiap daerah hendaknya mempersiapkan pendirian sekolah internasional. Dalam rangka merealisasikan peraturan tersebut, maka pemerintah mencanangkan program perencanaan peningkatan mutu pendidikan melalui Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). RSBI dilaksanakan oleh sekolah-sekolah nasional yang dipersiapkan secara khusus agar memenuhi segala persyaratan untuk menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

Ternyata program RSBI mendapat sambutan tersendiri dengan maraknya pendirian RSBI pada jenjang-jenjang pendidikan, baik di kota besar maupun di daerah. Bahkan hingga tahun 2009 untuk jenjang pendidikan sekolah menengah, jumlah SMA RSBI di Indonesia mencapai 319 sekolah yang tersebar di 202 kota di 33 provinsi.

Antusiasme yang tinggi terhadap pendirian RSBI tidak hanya memberi efek positif berupa harapan terhadap peningkatan mutu pendidikan, tapi juga memberi efek negatif. RSBI kini sudah menjadi sebuah trend bagi sekolah untuk mengangkat namanya. Sekolah berlomba-lomba untuk mendapat status RSBI tanpa memperhatikan apakah kemampuan sekolah akan dapat mencapai standar yang telah ditentukan.

Selain itu, status RSBI juga berpengaruh terhadap besarnya biaya yang harus dibayarkan oleh wali siswa. Besarnya beban biaya RSBI disebabkan sekolah perlu menyesuaikan diri untuk mencapai standar internasional. Standar internasional yang dimaksudkan adalah dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan sehingga memiliki daya saing di forum internasional. Namun di sisi lain, subsidi yang diberikan pemerintah belum dapat sepenuhnya menyokong RSBI sehingga pembiayaan dibebankan pada wali siswa.

Besarnya biaya sekolah menimbulkan implikasi lainnya berupa terbatasnya golongan masyarakat yang dapat bersekolah di sekolah RSBI. Hanya siswa dari kalangan mampu secara ekonomi yang dapat menikmati pendidikan bertaraf internasional. Terjadi sebuah ketidakmerataan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu antara siswa yang mampu dan yang tidak mampu dalam hal ekonomi. Meskipun pemerintah telah menawarkan program subsidi silang untuk menjamin siswa kurang mampu untuk bersekolah di RSBI, kurang meratanya pendidikan antara golongan mampu dan kurang mampu masih menjadi sebuah masalah yang harus dipecahkan.

Karena jika hal ini terus dilaksanakan, maka RSBI akan condong pada praktek kapitalisasi dalam pendidikan. Pada kapitalisasi pendidikan, hanya orang

dari golongan mampu yang bisa menikmati fasilitas pendidikan. Hal ini bertentangan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional pasal 50 ayat 1 yang mengemukakan bahwa tiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam hal pendidikan. Praktek kapitalisme harus dibebaskan dalam hak dasar manusia, salah satunya adalah pendidikan.

Oleh karena itu, kelompok kami mengangkat judul "Fenomena Pendirian Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI): Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan atau Kapitalisasi Pendidikan".

Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Hasil akhir tulisan ini bertujuan untuk mempertahankan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) sebagai sekolah yang menjaga persamaan kesempatan dan keadilan pendidikan kepada seluruh masyarakat, dengan meminimalisir adanya praktek kapitalisme pendidikan. Persamaan tersebut bermakna bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama baik menurut status sosial ekonomi, agama, dan lokasi geografis untuk masuk ke RSBI seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 5 ayat (1) bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dari sinilah juga akan terwujud pemerataan pendidikan diseluruh golongan masyarakat karena RSBI dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

b. Manfaat

1. Bagi Siswa
   Siswa mendapatkan haknya untuk mengeyam pendidikan dengan kualitas yang bagus. Bakat dan kemampuan mereka dapat diasah dengan bimbingan profesional dan bertaraf interanasional sehingga menghasilkan generasi bangsa yang unggul.

2. Bagi Wali Siswa
   Wali siswa tidak terbebani dengan biaya sekolah yang besar. Sehingga tetap dapat menyekolahkan anak-anaknya meskipun dari golongan yang kurang mampu.

3. Pemerintah

Pemerintah akan menyukseskan program wajib belajar, juga akan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia tanpa menbebani banyak pihak. Akan terwujud generasi handal, yang nantinya akan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan unggul.

GAGASAN

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)

Dalam rangka memenuhi kebutuhan nasional akan sumber daya manusia yang unggul dan dapat bersaing secara internasional, pemerintah telah mencanangkan program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau RSBI. RSBI ini merupakan calon dari Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

RSBI didefinisikan sebagai sekolah rintisan yang menyiapkan peserta didiknya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Indonesia dan standar pendidikan lainnya (baik standar pendidikan dari dalam maupun luar negeri) yang mempunyai reputasi secara internasional. (Panduan Penyelenggaraan Rintisan SMA Bertaraf Internasional, 2007: 7).

Sedangkan menurut Pedoman Penjamin Mutu Sekolah/ Madrasah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional merupakan “Sekolah/Madrasah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan sehingga memiliki daya saing di forum internasional”. Pada prinsipnya, Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional harus bisa memberikan jaminan mutu pendidikan dengan standar yang lebih tinggi dari Standar Nasional Pendidikan (Pedoman Penjamin Mutu Sekolah/ Madrasah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, 2007: 12)

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional adalah realisasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN 20/2003) Pasal 50 ayat 3 yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

Adapun tujuan umum pengembangan program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional selain untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional juga sebagai sarana yang memberikan peluang baik kepada siswa maupun sekolah yang berpotensi untuk mencapai kualitas dan prestasi bertaraf nasional dan internasional.

Standar Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)

(Sistem Penyelenggaraan SBI untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, 2007: 3- 10)

Dalam rangka pencapaian tujuan pendirian RSBI, terdapat beberapa standar yang harus dipenuhi oleh sekolah. Standar tersebut antara lain:

1. Output/ lulusan SBI
   Keluaran (output) dari Sekolah Bertaraf Internasional diharapkan dapat memiliki kemampuan dalam menguasai Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang merupakan standar minimal di tingkat nasional, *plus* kemampuan lain yang diadopsi atau diadaptasi dari dalam atau luar negeri, yang telah memiliki mutu yang diakui secara internasional.
2. Proses Penyelenggaraan RSBI
   Proses penyelenggaraan RSBI mampu menanamkan dan menerapkan nilai, norma dan etika. Pembelajaran diterapkan dengan keterbukaan dan demokratis yang mampu menumbuhkembangkan kreativitas, inovasi dan daya nalar siswa. Bahasa pengantar pembelajaran adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing (khususnya Bahasa Inggris), serta menggunakan media pendidikan yang berteknologi tinggi.
3. Input
   Input RSBI merupakah modal dasar dari kelancaran berlangsungnya proses pendidikan bertaraf internasional. Input tersebut, antara lain :

   <u>Siswa Baru</u>
   Input dalam Rintisan Sekolah Berstandar Internasional mencakup siswa baru yang diseleksi secara ketat melalui saringan rapor, ujian akhir sekolah, *scholastic aptitude test (SAT)*, kesehatan fisik, dan wawancara. Siswa baru RSBI harus memiliki kecerdasan yang unggul, meliuti kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, dan berbakat.

   <u>Kurikulum</u>
   Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional merupakan cikal bakal dari Sekolah Bertaraf Internasional. Oleh karena itu kurikulum yang dipakai harus dikembangkan agar memenuhi isi Standar Nasional Pendidikan serta adopsi kurikulum beberapa sekolah dari dalam atau luar negeri yang memiliki keunggulan dan reputasi di forum internasional.

   <u>Pendidik dan Tenaga Kependidikan</u>
   Ada beberapa persyaratan baik untuk pendidik maupun tenaga pendukung seperti laboran, pustakaan, teknisi komputer, tenaga administrasi, dan kesekretariatan dalam Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.

   - Kepala sekolah harus memiliki kemampuan profesional dalam manajemen, kepemimpinan, organisasi, administrasi, dan kewirausahaan.
   - Guru dituntut memiliki kemampuan profesional, kepribadian, dan sosial bertaraf internasional. Persayaratan penting yang harus dimiliki yakni

penguasaan komunikasi menggunakan bahasa asing serta kemampuan menggunakan *information communication technology* (ICT).

- Tenaga pendukung juga wajib mampu berkomunikasi dalam bahasa asing, khususnya bahasa inggris. Mereka juga dituntut untuk dapat mengoperasikan alat-alat berbasis ICT.

Sarana dan Prasarana

Indikator sarana prasarana Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional ditandai dengan beberapa sarana prasarana diantaranya sarana pembelajaran bertaraf TIK di setiap ruang kelas, perpustakaan juga dilengkapi dengan sarana digital yang memberikan akses ke sumber pembelajaran bertaraf TIK di seluruh dunia, serta sekolah harus dilengkapi dengan ruang multi media, ruang unjuk seni budaya, faslitas olah raga, klinik, dan sebagainya.

Pembiayaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)

Untuk mencapai standar yang telah ditentukan diatas, tidak dapat dipungkiri bahwa penyelenggaraan RSBI memerlukan biaya yang cukup besar. RSBI membutuhkan banyak perbaikan, pengembangan, serta penyediaan kelengkapan fasilitas untuk mengejar standar internasional dan menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) sepenuhnya.

Maka dari itu pemerintah pusat dan daerah membuat suatu kesepakatan dalam pembiayaan , yaitu pemerintah pusat 50%, pemerintah propinsi 30%, dan pemerintah kabupaten/ kota 20%. Namun hal ini dapat berubah tergantung pada kekayaan daerah, artinya pemerintah daerah dapat berkontribusi lebih daripada kesepakatan yang telah dibuat. Namun, diharapkan bahwa subsidi dari pemerintah pusat hanya dalam fase rintisan (RSBI) dengan kurun waktu 3 tahun dan pembiayaan selanjutnya dapat ditangani oleh pemerintah daerah melalui otonomi daerah.

Bagi sekolah swasta, pembiayaan RSBI diserahkan sepenuhnya pada yayasan yang menaungi sekolah tersebut. Namun pemerintah juga dapat memberikan subsidi melalui persyaratan tertentu.

Berkaitan dengan terbatasnya subsidi dari pemerintah, maka pembiayaan lebih dibebankan pada wali siswa. Biaya yang cukup besar harus dibayarkan oleh wali dalam rangka pengembangan RSBI. Salah satu contoh nyata terjadi ada di program kelas RSBI SMAN 1 Lamongan. Menurut salah satu wali siswa yang anaknya diterima di kelas RSBI tersebut, para wali siswa diberi blanko kesanggupan untuk membayar uang sekolah yang sudah ditentukan nominal uangnya, yakni minimal 3 juta rupiah dan maksimal 10 juta rupiah dengan alasan uang tersebut digunakan untuk merenovasi gedung dan pembelian berbagai

perlengkapan. Program RSBI di SMAN 2 Lamongan biayanya lebih mahal lagi, dengan biaya minimal 4 juta rupiah dan tidak ada batasan maksimal sehingga wali murid bisa membayar berapapun asalkan di atas 4 juta rupiah (Radar Bojonegoro, 4/7/2009).

Adanya pembayaran biaya sekolah dengan nominal yang cukup besar akan membatasi hak dari siswa yang kurang mampu untuk dapat menikmati pendidikan bertaraf internasional. Padahal terdapat banyak memungkinan bahwa siswa yang kurang mampu dalam ekonomi, memiliki kemampuan dan kualitas untuk bersaing dan diakui di sekolah RSBI. Mereka juga memiliki hak sebagai warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu, yang telah ditetapkan di dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sisdiknas dalam Pasal 5 Ayat 1. Terjadi sebuah ketidakmerataan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu antara siswa yang mampu dan yang tidak mampu dalam hal ekonomi.

Apabila persoalan diatas terus berlanjut, maka RSBI akan condong pada praktek kapitalisasi dalam pendidikan. Pada kapitalisasi pendidikan, hanya orang dari golongan mampu secara ekonomi yang bisa menikmati fasilitas pendidikan. Nilai pendidikan yang bertujuan mencerdaskan anak bangsa dibenturkan pada kepentingan untuk mencari biaya demi kelangsungan RSBI yang banyak dibebankan pada wali siswa. Praktek kapitalisme harus dibebaskan dalam hak manusia untuk mendapat fasilitas pendidikan.

Pemerintah telah menawarkan sebuah jalan keluar atas permasalahan biaya sekolah RSBI dengan program subsidi silang. Program ini mengatur pembayaran uang sekolah berdasarkan kemampuan dari wali siswa. Siswa yang berasal dari keluarga yang mampu akan membayar lebih banyak daripada siswa dari kalangan tidak mampu, sehingga akan menyokong kekurangan dana yang seharusnya dibebankan pada siswa kurang mampu. Dengan program ini, siswa kurang mampu tetap dapat mendapatkan haknya tanpa memaksakan diri dalam pembiayaan sekolah RSBI yang cukup besar.

Selain itu pemerintah juga menggagas adanya peran masyarakat dalam kelancaran proses penyelenggaraan RSBI. Mengingat keterbatasan dana dari pemerintah pusat dan daerah, maka diperlukan juga dana swadaya masyarakat untuk menjamin berlangsungnya sekolah internasional melalui sosialisasi sehinggga dapat menarik kepedulian dari masyarakat.

Namun subsidi silang belum dapat terwujud secara nyata bila ditinjau dari mayoritas siswa RSBI adalah kalangan mampu. Melihat dari besarnya biaya yang harus dibayarkan hanya pada awal masuk sekolah, pasti wali siswa dari kalangan tidak mampu akan berpikir berulang kali untuk memasukkan putra putrinya dalam RSBI meskipun mereka memiliki kemampuan yang sangat memadai dalam bidang akademik.

Seperti yang terjadi dalam pendaftaran siswa baru sekolah RSBI di kota Semarang. Disebutkan bahwa tidak ada satu pun siswa miskin yang mendaftarkan diri ke SMP RSBI di kota Semarang hingga masa pendaftaran berakhir. Padahal, keberadaan sekolah ini diharapkan dapat menampung siswa dari semua golongan. Tidak ada satu pun dari seluruh siswa yang mendaftar menggunakan kartu tanda penerima bantuan langsung tunai (BLT) atau beras untuk orang miskin sebagai identitas penunjuk keluarga miskin pada masa pendaftaran RSBI dimulai pada 25-

30 Mei 2009. Kepala SMPN 5 Kota Semarang, Suharto, mengatakan bahwa tidak mendaftarnya siswa miskin ke RSBI dimungkinkan karena khawatir akan dipungut biaya. Padahal Kepala Dinas Pendidikan memastikan siswa miskin yang bersekolah di RSBI tidak akan dipungut biaya sepeserpun seperti layaknya di sekolah reguler. Sekolah dapat menerapkan mekanisme subsidi silang dari keluarga kaya kepada keluarga yang tidak mampu melalui sumbangan yang ditetapkan pada rapat komite sekolah (kompas.com).

Gagasan Baru

Dengan adanya berbagai permasalahan yang timbul, diperlukan solusi baru yang diharapkan akan dapat diimplementasikan dan menyempurnakan solusi yang telah ada sebelumnya. Adapun solusi yang kami gagas meliputi program reguler dan mandiri dalam penerimaan siswa baru, dan standarisasi seleksi penerimaan siswa baru RSBI. Dua solusi tersebut bertujuan untuk melaksanakan amanat pemerataan pendidikan yang telah ada dalam undang-undang, dan mengenai perbaikan prosedur program subsidi silang secara transparan dan merata sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Pertama adalah sistem seleksi penerimaan siswa baru RSBI. Pemerintah diharapkan dapat membuat standar atas seleksi masuk RSBI, yang sekurang-kurangnya digagas oleh pemerintah tingkat daerah. Peembuatan standar ini dimaksudkan agar input siswa RSBI benar-benar berkualitas dan proses seleksi siswa menjadi transparan. Standar tes seleksi masuk RSBI ini meliputi penyaringan nilai raport, nilai Ujian Akhir Nasional, dan tes tulis.

1. Penyaringan nilai raport, yang terdiri atas nilai akademik dan kegitan non akademik. Nilai akademik ini tidak hanya ditinjau dari pemahaman bidang eksakta seperti MIPA, namun juga dari pelajaran ilmu sosial, bahasa, atau bidang seni. Sedangkan non akademis ditinjau dari keaktifan siswa dalam kegiatan ekstrakulikuler maupun organisasi.
2. Nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) yang merupakan nilai akhir dari penilaian proses pembelajaran di tingkat sekolah yang sebelumnya.
3. Tes tulis, yang telah distandarisasi oleh dinas pendidikan tingkat daerah. Tes tulis ini bukan tes yang ditentukan oleh masing-masing sekolah seperti saat ini. Soal tes yang telah distandarkan akan memberikan batasan jelas terhadap kemampuan minimal siswa yang bisa mengeyam pendidikan di sekolah RSBI.

Selain seleksi diatas, juga perlu ditambahkan tes psikologi siswa. Seleksi ini tidak perlu distandarkan oleh pemerintah karena sudah ada instansi terkait yang telah memiliki kualifikasi tersendiri yang akan menjalin kerjasama dengan sekolah.

Setelah semua tes selesai dilaksanakan, nilai akhir yang keluar harus transparan dan diumumkan kepada masyarakat. Bahkan perlu dilampirkannya lembar penilaian akhir yang nantinya akan diserahkan dalam laporan kepada Dinas Pendidikan di daerah yang bersangkutan.

Langkah diatas bermaksud mencegah KKN dan praktek kapitalisme dalam penerimaan siswa baru RSBI, serta input siwa RSBI adalah benar-benar siswa yang berkualitas. Tidak hanya dari siswa kalangan mampu secara ekonomi, tapi juga siswa yang tidak mampu asalkan mereka berkualitas dan dapat melewati tes dengan baik.

Kedua, adalah menjalankan program subsidi silang melalui dibukanya program mandiri atau jalur khusus bagi sekolah RSBI. Sehingga akan ada dua jalur masuk RSBI, yaitu RSBI reguler dan RSBI mandiri.

RSBI jalur reguler adalah siswa RSBI yang murni diterima atas penilaian prestasinya, tetapi RSBI mandiri adalah siswa yang diterima atas penilaian prestasi dan kesanggupan membayar biaya. Dengan adanya program mandiri, siswa yang memiliki keinginan masuk RSBI tapi kemampuan akademisnya tergolong rata-rata dapat, tetap dapat masuk RSBI dengan syarat bersedia membayar dengan biaya yang lebih besar daripada siswa di jalur reguler.

Kemudian, adanya pembedaaan jalur masuk, maka pihak sekolah akan mempunyai pemetaan kemampuan ekonomi wali siswa secara jelas, sehingga sekolah akan dapat menjalankan program subsidi silang dengan tepat sasaran kepada siswa yang memang tidak mampu secara ekonomi.

Dengan adanya sistem pembiayaan seperti ini, kapitalisasi pendidikan akan dapat diminimalisir. Wali siswa yang mampu secara ekonomi memang membayar lebih dan sekolah tidak memukul rata pembiayaan pada semua siswa. Pada kapitalisasi pendidikan, hanya orang dari golongan mampu secara ekonomi yang bisa menikmati fasilitas pendidikan yang berkualitas, tapi dalam jalur reguler dan mandiri ini, semua siswa dapat menikmati pendidikan berkualitas dengan merata.

Namun perlu digarisbawahi bahwa ada beberapa prosedur bagi sekolah untuk melaksanakan program mandiri, prosedur tersebut antara lain:

1. Sekolah harus mematok nilai minimal bagi calon siswa yang akan mengikuti jalur mandiri, sehingga mereka mandiri tetap berkualitas dari segi akademik.
2. Calon siswa yang mengikuti jalur mandiri harus mengikutsertakan berkas-berkas berupa slip gaji orang tua, rekening listrik, dan pernyataan kesanggupan dari orang tua untuk membayar dengan biaya yang lebih tinggi.
3. Biaya yang dibebankan disesuaikan dengan kebijakan dan kondisi tiap-tiap sekolah.

Kelengkapan berkas-berkas diatas bertujuan agar sekolah dapat membatasi orang tua yang memaksakan kehendak untuk menyekolahkan anaknya di RSBI sedangkan ia memiliki keterbatasan ekonomi.

Maka, dengan adanya gagasan baru diatas, diharapkan dapat menjadikan RSBI sebagai sekolah yang benar-benar berkualitas dan terbuka bagi semua kalang.

KESIMPULAN

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, dapat meminimalisir praktek kapitalisasi untuk mengatasi pembiayaan yang besar. Di sisi lain, pemerataan kesempatan untuk mengeyam pendidikan di RSBI juga dapat terbuka lebar bagi semua kalangan.

Adapun solusi yang digagas meliputi standarisasi seleksi penerimaan siswa baru RSBI , dan pembukaan program mandiri dalam penerimaan siswa baru. Dua solusi tersebut bertujuan untuk melaksanakan amanat pemerataan pendidikan yang telah ada dalam undang-undang, dan mengenai perbaikan prosedur program subsidi silang secara transparan dan merata sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Pertama adalah sistem seleksi penerimaan siswa baru RSBI yang disatandarisasi oleh Dinas Pendidikan tingkat daerah, yang bertujuan agar input siswa baru RSBI benar-benar berkualitas dan proses seleksi siswa menjadi transparan. Standar tes seleksi masuk RSBI ini meliputi penyaringan nilai raport, nilai Ujian Akhir Nasional, dan tes tulis. Adapun tes psikologi siswa, namun tes ini tidak perlu distandarkan oleh pemerintah karena sudah ada instansi terkait yang telah memiliki kualifikasi tersendiri yang akan menjalin kerjasama dengan sekolah.

Kedua, adalah menjalankan program subsidi silang melalui dibukanya program mandiri atau jalur khusus bagi sekolah RSBI. Sehingga akan ada dua jalur masuk RSBI, yaitu RSBI reguler dan RSBI mandiri. Pembedaan dua jalur ini ada pada kesanggupan pembayaran biaya sekolah. Kemudian, adanya pembedaaan jalur masuk, maka pihak sekolah akan mempunyai pemetaan kemampuan ekonomi wali siswa secara jelas, sehingga sekolah akan dapat menjalankan program subsidi silang dengan tepat sasaran kepada siswa yang memang tidak mampu secara ekonomi.

Maka, dengan adanya gagasan baru diatas, diharapkan dapat menjadikan RSBI sebagai sekolah yang benar-benar berkualitas dan terbuka bagi semua kalangan.

Adanya standar dan mekanisme yang transparan pada penerimaan siswa baru, dapat menjaring siswa baru yang benar-banar berkualitas dan dapat menerima proses pembelajaran di RSBI sehingga hasil belajar pun akan maksimal.

Serta adanya pembukaan jalur mandiri di RSBI sebagai pelaksanaan dari program subsidi silang, akan menjamin pemerataan kesampatan pendidikan bagi

semua kalangan. RSBI tidak lagi menjadi sekolah eksklusif bagi kalangan tertentu, dan kualitas pendidikannya juga benar-benar berkualitas dan bersaing di forum internasional untuk mengangkat nama pendidikan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. 2007. *Sistem Penyelenggaraaan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.* Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta

Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas. 2007. *Panduan Penyeleggaraan Rintisan SMA Bertaraf Internasional*. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta

Faridh, Adi. 2009. *Balung Kere Dilarang Sekolah*. www.lingkarjatim.com . Diakses 24 Februari 2010

Hasbullah. 2009. *Dasar- dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta : Rajawali Pers

Kompas. 2009. *Tak Ada Siswa Miskin yang Daftar SMP RSBI*. di dalam smandaku.com . Diakses 7 Februari 2010

Malang Post. 2009. *Pendaftaran RSBI SMP dan SMA Mulai 22 Juni*. http://malangraya.web.id/2009/06/04/pendaftaran-rsbi-smp-dan-sma-mulai-22-juni/. Diakses 24 Februari 2010

Pikiran Rakyat Bandung. 2010. *Jumlah RSBI Terus Bertambah: Dikhawatirkan Mempersempit Akses Pendidikan Kalangan Tak Mampu.* http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=106293. Diakses 24 Februari 2010

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Ketua Pelaksana Kegiatan

1. Nama Lengkap : Zurriat Nyndia Rahmawati
2. NIM : 109221422441
3. Jurusan/ Angkatan : Sastra Inggris/ 2009
4. Universitas : Universitas Negeri Malang
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Tempat/ Tanggal Lahir : Malang, 28 Mei 1991
8. Alamat/ No. Telp : Jalan Simpang Dirgantara V B6/ 02, Malang 08563619946
9. Karya Ilmiah yang Pernah Dibuat : -
10. Penghargaan Ilmiah yang Pernah Diraih : -

Anggota 1

1. Nama Lengkap : Alfima Azmi Imananda
2. NIM : 109221422432
3. Jurusan/ Angkatan : Sastra Inggris/ 2009
4. Universitas : Universitas Negeri Malang
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Agama : Islam
7. Tempat/ Tanggal Lahir : Malang, 13 Agustus 1991
8. Alamat/ No. Telp : Jalan Cokroaminoto 54, Wajak – Malang 085755627374
9. Karya Ilmiah yang Pernah Dibuat : -
10. Penghargaan Ilmiah yang Pernah Diraih : -

Anggota 2

1. Nama Lengkap : Eko Jayanto
2. NIM : 108241410636
3. Jurusan/ Angkatan : Sastra Jerman/ 2008

4. Universitas : Universitas Negeri Malang
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. Tempat/ Tanggal Lahir : Malang, 4 Agustus 1990
8. Alamat/ No. Telp : Jalan Welirang 8, Kepanjen - Malang
9. Karya Ilmiah yang Pernah Dibuat : -
10. Penghargaan Ilmiah yang Pernah Diraih : -